

ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan suatu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dispensasi kawin merupakan pengecualian dari Pasal 7 ayat (1) yaitu batas usia menikah pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Brebes Nomor 372/Pdt.P/2020/PA.Bbs), penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian prespektif analisis. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 372/Pdt.P/2020/PA.Bbs mendasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mempertimbangkan peraturan lain yang sejalan dengan asas maksud dan tujuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : *Dispensasi Kawin, Permohonan.*

ABSTRACT

The dispensation of marriage is an entitlement to a person to marry while not at the minimum age. The dispensation of marriage is arranged in article 7 Paragraph (2) Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning marriage is an exception to chapter Article 7 paragraph (1) regulates the age limit of marriage for both men and women is 19 years.

The study was intended to know the legal consideration of the judge in granting the application of marriage dispensations (Judicial Review of Brebes Religious Court Decision Number 372/Pdt.P/2020/PA.Bbs), The method used in this research normative juridical method with analytical prescriptive research specifications. The types and data used are secondary data obtained from literature research.

Judge in granting case Number 372/Pdt.P/2020/PA.Bbs based on Article 7 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, They did not consider other articles that were in line with the principles of the aims and objectives of Article 1 Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights act, Law Number 20 of 2003 government regulation Law Number 47 of 2008 statute mandatory learning, and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Laws Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *Married Dispensation, Petition.*

